

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perumahan adalah lingkungan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.

Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, dan kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin ciri-cirinya antara lain; letaknya tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, kepadatan bangunan tinggi, luas lahan terbatas, rawan penyakit sosial dan lingkungan, kualitas bangunan rendah, prasarana lingkungan tidak sehat, persampahan membahayakan penghuninya. Sebuah Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa

keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35,291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, disisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2016-2021 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2021, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung pemerintah

daerah sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat.

Program Kotaku adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan upaya strategis direktorat jenderal cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah (pemkab/pemkot) dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh diperkotaan demi mendukung pencapaian gerakan 100-0-100 (100% tersedia akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% tersedia akses sanitasi layak) sesuai dengan amanah RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) tahun 2015-2021.

Tujuan program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektare melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38,431 hektare skala nasional. serta, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui seberapa efektif pengaruh pelaksanaan program dan bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama dari segi aksesibilitasnya. Untuk itu penulis melakukan

penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul “pengaruh pelaksanaan program pengembangan kota tanpa kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat Di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program pengembangan kota tanpa kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat yang mendapatkan program kotaku di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, dengan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program KOTAKU di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Bagaimana Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Program Kotaku di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Bagaimana pelaksanaan program kotaku terhadap aksesibilitas masyarakat di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang ”pengaruh pelaksanaan program pengembangan kota tanpa kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat kelurahan parit Lalang provinsi kepulauan bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kotaku di kecamatan rangkui kelurahan parit lalang kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka belitung
2. Untuk mengetahui aksesibilitas masyarakat dalam program kotaku di kecamatan rangkui kelurahan parit lalang kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka belitung
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program kotaku terhadap aksesibilitas masyarakat di kecamatan rangkui kelurahan parit lalang kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka Belitung

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat yang menerima program kotaku.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan saran pemikiran kepada masyarakat di Kecamatan Parit Lalangi Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka-Belitung tentang pelaksanaan program pengembangan kota tanpa kumuh terhadap aksesibilitasnya

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Konsep kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi secara professional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. kesejahteraan sosial merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap masyarakat dan masalah sosial didalam masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto (2010) tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin. Yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila/UUD.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila/Undang-undang dasar 1945. Sedangkan pekerjaan sosial sendiri menurut Zastrow sebagaimana dikutip Suharto (2010a;2010b) mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktifitas profesional untuk menolong Individu kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial mempunyai dua tujuan dalam pelaksanaannya yaitu: meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dan aman. Sedangkan pada pekerjaan sosial ada dua pengertian yang menunjang pengertian pekerjaan sosial itu sendiri yaitu: keberfungsian sosial dan masalah sosial. Keberfungsian sosial sendiri menurut (Suharto , 2009) adalah

Kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi atau merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial serta menghadapi guncangan dan tekanan.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur penting dalam pekerjaan sosial yaitu: Kemampuan dalam memenuhi atau merespon kebutuhan dasar dan Kemampuan menjalankan peranan sosial serta menghadapi guncangan dan tekanan. Sedangkan masalah sosial menurut (Soerjono Soekanto, 2012) adalah: “suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat”.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah sosial dapat diidentikkan dengan dua kata yaitu: ketidaksesuaian dan sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat.

Program KOTAKU adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan upaya strategis direktorat jenderal

cipta karya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah (pemkab/pemkot) dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh diperkotaan demi mendukung pencapaian gerakan 100-0-100 (100% tersedia akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% tersedia akses sanitasi layak) sesuai dengan amanah RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) tahun 2015-2021.

Tujuan program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektare melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38,431 hektare skala nasional. serta, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Memahami hakekat Pelaksanaan, maka harus terlebih dahulu dipahami pengertian pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab (2005 : 65) dalam situs (<http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-pelaksanaan-menurut-para-ahli-lengkap/>)

tentang pelaksanaan adalah:

pelaksanaan ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Definisi diatas yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di Wahab (2005 : 65) bahwa pelaksanaan adalah pemahaman yang



sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan kebijakan pelaksanaan. Sedangkan pengertian aksesibilitas menurut (Schlager Dan Ostrom:1992) aksesibilitas adalah:

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek , pelayanan ataupun lingkungan, kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa derajat kemudahan seseorang dalam mendapatkan pelayanan yang diimplementasikan dalam bentuk fisik dan non fisik. Dilihat dari jenisnya Aksesibilitas masyarakat dalam pembangunan sendiri meliputi 2 tingkatan -tingkatan aksesibilitas, yaitu :

- a. Aksesibilitas fisik: suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan
- b. Aksesibilitas non fisik: suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem.

## **1.5 Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan pada penelitian yang berjudul: pengaruh pelaksanaan program pengembangan kota tanpa kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat di kecamatan rangkui kelurahan parit lalang provinsi kepulauan bangka-belitung adalah sebagai berikut:

### **1. Hipotesis utama**

#### **Hipotesis Null (H<sub>0</sub>)**

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program Pengembangan Kota Tanpa Kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat di Kelurahan

Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Hipotesis Kerja (H1)**

H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program Pengembangan Kota Tanpa Kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **2. Sub Hipotesis**

1. H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program Pengembangan Kota Tanpa Kumuh terhadap aksesibilitas fisik masyarakat di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program Pengembangan Kota Tanpa Kumuh terhadap aksesibilitas fisik masyarakat di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. H<sub>0</sub> : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program Pengembangan Kota Tanpa Kumuh terhadap aksesibilitas non fisik masyarakat di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh yang signifikan dalam hal pelaksanaan Program Pengembangan Kota Tanpa Kumuh terhadap aksesibilitas non fisik masyarakat

di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian. Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program adalah: peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.
2. Masyarakat adalah: sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut
3. Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan, kemudahan akses tersebut di implementasikan pada bangunan gedung, lingkungan, dan fasilitas umum lainnya



	2. Pelaksanaan dan peningkatan kualitas sanitasi	5. Drainase lingkungan	11. pengelolaan sistem drainase lingkungan perkotaan. 12. upaya pemerintah mengalirkan limpahan air hujan .
	3. Pelaksanaan dan peningkatan kualitas Air bersih	6. Pengelolaan air limbah  7. Pengelolaan sampah  8. Penyediaan air minum	13. ketersediaan sistem pengelolaan air limbah diperkotaan. 14. kualitas buangan air limbah sesuai standar yang berlaku.  15. ketersediaan sistem pengelolaan sampah diperkotaan. 16. ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.  17. ketersediaan akses air minum di perkotaan. 18. pemenuhan kebutuhan air minum setiap individu diperkotaan.

Variable Y:  AKSESIBILITAS MASYARAKAT	1. Aksesibilitas fisik	1. Jalan raya	19. aksesibilitas jalan raya yang diterima masyarakat parit lalang
		2. perumahan	20. aksesibilitas perumahan yang diterima masyarakat parit lalang
	2. Aksesibilitas non fisik	3. air bersih	21. aksesibilitas air bersih yang diterima masyarakat parit lalang
		4. tempat pembuangan sampah	22. aksesibilitas tps yang diterima masyarakat parit lalang
		5. pelayanan publik	23. aksesibilitas pelayanan publik yang diterima masyarakat parit lalang

## **1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.7.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

### **1.7.2 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

Pengertian populasi menurut sugiyono (2008:80) yaitu: “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan parit Lalang yang menerima program dan yang tidak menerima.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik sampling jenuh atau sensus menurut sugiono (2008:122) yaitu: “sampling jenuh atau sensus adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampling jenuh atau sensus Teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di RW 01 sebanyak 80 orang sehingga untuk mencari kelompok eksperimen dan kontrol diambil 30% dari

80 orang sehingga diperoleh hasil 24 responden pada kelompok eksperimen (kelompok masyarakat yang telah mendapatkan program pengembangan kotak di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 24 responden pada kelompok kontrol (kelompok yang tidak mendapatkan program pengembangan kotak di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Kelompok Eksperimen = 24

Kelompok Kontrol = 24

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **1. Studi Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian

#### **2. Studi Lapangan**

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung di lapangan dengan Teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi non partisipan:** yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.



- b. Wawancara:** yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat yang menerima dan tidak menerima program
- c. Angket:** yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diisi oleh responden diajukan langsung kepada responden, hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan responden.

#### 1.7.4 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan skala ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian skala ordinal menurut soehartono (2011:76) sebagai berikut.

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari golongan lain.

Teknik pengukuran yang digunakan adalah model likert, yaitu skala yang mempunyai nilai pengikat setiap jawaban atau tanggapan yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total.

Pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut.

- a. Kategori jawaban sangat terpenuhi diberi nilai 5.
- b. Kategori jawaban terpenuhi diberi nilai 4.
- c. Kategori jawaban kurang terpenuhi diberi nilai 3.

- d. Kategori jawaban tidak terpenuhi diberi nilai 2.
- e. Kategori jawaban sangat tidak terpenuhi diberi nilai 1

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan Teknik analisis dan kuantitatif, yaitu data yang diubah kedalam angka-angka yang dituangkan dalam tabel. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara program pengembangan kota tanpa kumuh terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap aksesibilitas masyarakat, maka digunakan uji tes U-MAN WHITNEY. U-test ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sample independent bila datanya berbentuk ordinal. Test ini merupakan tes terbaik untuk menguji hipotesis komparatif dua sample independent bila datanya berbentuk ordinal. Bila dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, maka perlu dirubah dulu ke dalam data ordinal. Bila data masih berbentuk interval, sebenarnya dapat menggunakan t-test untuk pengujiannya, tetapi bila asumsi t-test tidak dipenuhi, misalnya data harus normal, maka test ini tidak dapat digunakan.

Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian, yaitu rumus-rumus dibawah ini, kedua rumus tersebut digunakan dalam perhitungan, karena akan digunakan untuk mengetahui harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih kecil tersebut yang digunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan U table.

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

$$U_2 = n_1 n_2 + \frac{n_2(n_2 + 1)}{2} - R_2$$

Dimana :

$n_1$  = jumlah sampel kelompok 1

$n_2$  = jumlah sampel kelompok 2

$U_1$  = Jumlah peringkat kelompok 1

$U_2$  = Jumlah peringkat kelompok 2

$R_1$  = Jumlah rangking pada kelompok sample  $n_1$

$R_2$  = Jumlah rangking pada kelompok sample  $n_2$

## **1.8 Lokasi dan waktu penelitian.**

### **1.8.1 Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang pada kelompok masyarakat yang mendapatkan program pengembangan kota tanpa kumuh Di Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun alasan penelitian memilih lokasi tersebut merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan program kota tanpa kumuh dari kementerian perumahan rakyat dan pekerjaan umum Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

### **1.8.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama enam bulan terhitung sejak bulan November 2017 sampai Februari 2018, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut.

- a. Tahap persiapan
- b. Tahap pelaksanaan
- c. Tahap pelaporan

**Tabel 1.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		2017-2018						
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
	Tahap Pra Lapangan							
1	Penjajakan							
2	Studi Literatur							
3	Penyusunan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Penyusunan Pedoman Wawancara							
	Tahap Pekerjaan Lapangan							
6	Pengumpulan Data							
7	Pengolahan & Analisis Data							
	Tahap Penyusunan Laporan Akhir							
8	Bimbingan Penulisan							
9	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir							
10	Sidang Laporan Akhir							

Sumber Tabel: Hasil Penelitian 2017-2018